

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keikutsertaan masyarakat dalam proses politik tidak hanya sebatas mendukung keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun juga mencakup partisipasi aktif dalam seluruh tahapan pengambilan keputusan. Hal ini termasuk proses pembuatan kebijakan, penilaian terhadap keputusan yang diambil, serta partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Keterlibatan ini sangat penting karena mencerminkan suara dan aspirasi masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi politik yang paling mudah diukur dan memiliki dampak signifikan adalah partisipasi dalam pemilihan umum, yang menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses demokrasi.

Sule & Sambo (2020) menyatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih dapat dijadikan indikator untuk mengetahui sistem demokrasi sebuah negara (Fauzi, 2023). Wujud baik dari demokrasi dapat dilihat pada tingginya partisipasi pemilih disuatu negara. Namun, sebaliknya adanya permasalahan dan diperlukan adanya solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menunjukkan rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum disuatu negara. Fenomena ini tercermin dalam hasil Pilkada tahun 2024.

Menurut Robert D. Putnam menyatakan bahwa penurunan modal sosial, seperti keterlibatan dalam organisasi masyarakat dan kepercayaan antarwarga berkontribusi pada menurunnya partisipasi politik dan melemahnya institusi

demokrasi. Dalam konteks Indonesia, penurunan partisipasi dalam Pilkada dapat mencerminkan tantangan serupa dalam membangun dan memelihara modal sosial yang kuat sebagai pondasi demokrasi yang sehat. Hasil yang diperoleh dalam Pilkada tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah. Ancaman yang ditimbulkan dari menurunnya partisipasi politik ini adalah menurunnya kualitas demokrasi. Dilansir dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Pilkada tahun 2024 tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan kurang dari 70 persen. Hal tersebut menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dibandingkan dengan Pilkada tahun 2020 yang mencapai 75,46 persen (KPU Kota Solok, 2024).

Kota Solok mengalami penurunan partisipasi politik yang signifikan dalam pemilihan kepala daerah, dimana persentase partisipasi tahun 2020 mencapai 75,46% sedangkan pada tahun 2024 hanya 66,81%. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah Kota Solok telah berupaya aktif mensosialisasikan pentingnya Pilkada sebagai salah satu pilar demokrasi, tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan politik masyarakat masih cukup besar. Penurunan ini menunjukkan berkurangnya kesadaran di kalangan masyarakat Kota Solok mengenai pentingnya berpartisipasi dalam proses politik, terutama dalam Pilkada. Salah satu faktor yang ikut memengaruhi rendahnya partisipasi pemilih adalah masih maraknya praktik politik uang, yang merusak kualitas demokrasi dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. Kondisi ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan

yang mengiringi proses pemilihan, salah satunya adalah praktik politik uang yang masih marak terjadi dan menjadi bagian dari dinamika Pilkada di Kota Solok.

Dalam pilkada, politik uang merupakan pelanggaran dalam kampanye. Politik uang sudah dianggap sebagai hal yang sudah biasa dan menjadi norma baru dalam perilaku politik selama pesta demokrasi yang berlangsung setiap lima tahun di Indonesia. Bawaslu Kota Solok menerima dan memproses laporan terkait pelanggaran Pilkada tahun 2024.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solok menerima dan memproses 10 laporan terkait pelanggaran Pilkada tahun 2024 dimana dari laporan tersebut terdapat 2 laporan yang berkaitan dengan politik uang. Situasi ini mendorong BAWASLU untuk menganggap politik uang sebagai salah satu ancaman. Peristiwa yang terjadi menunjukkan bahwa kejahatan politik berupa jual beli suara dan korupsi pilkada terus memberikan ancaman nyata terhadap pelaksanaan demokrasi.

Edward Aspinal dan Ward Barendschot (2019), ia mengatakan pemilih sering secara bersamaan menegaskan bahwa pembayaran uang tunai adalah bagian dari praktik yang benar-benar normal dan dipandang sebagai bagian dari praktik kebiasaan setempat pada waktu berlangsungnya pemilihan, dan menyatakan bahwa mereka akan enggan memilih calon yang sama sekali tidak memberikan apa pun. Pembayaran merupakan praktik yang telah mendarah daging, ia telah menjadi norma sosial yang kuat. Kecurangan Pilkada sering kali diawali oleh tindakan kriminal dalam pemilihan walikota. Fenomena ini tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kemajuan budaya bangsa Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-

nilai moral. Dampak dari maraknya praktik politik uang tidak hanya tercermin dalam laporan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu, tetapi juga terlihat secara nyata dalam data partisipasi pemilih, salah satunya melalui jumlah surat suara yang tidak digunakan.

Indeks Partisipasi Pemilu (IPP 2024), skor hasil IPP dikategorikan menjadi rendah, sedang dan tinggi berdasarkan persentil dengan dibatasi persentase target partisipasi Pemilu yaitu, 77,5% yang dimaknai sebagai partisipasi tinggi dan 60% sebagai rata-rata partisipasi rendah (IPP, 2024). Oleh karena itu, daerah dengan persentase IPP <60% akan dikategorisasikan sebagai daerah dengan IPP rendah, dan daerah dengan IPP >77,5 dikategorikan sebagai IPP tinggi. Berdasarkan data dari KPU Kota Solok, terdapat 15 TPS di Kelurahan Nan Balimo, dimana persentase tertinggi diperoleh pada TPS 15 yaitu sebesar 70,84% dan persentase paling rendah diperoleh di TPS 9 yaitu sebesar 59,76%.

Dapat disimpulkan bahwa persentase partisipasi pemilih di TPS 9 tergolong dalam kategori rendah karena tidak memenuhi Indeks Partisipasi Pemilu dimana partisipasi pemilih dinyatakan tinggi apabila mencapai >77,5% sedangkan pada TPS 9 persentase pemilih hanya 59,76%. Hasil yang didapatkan pada TPS 9 Kelurahan Nan Balimo terdapat 497 total surat suara, dimana 297 surat suara yang digunakan dan 200 jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai. Fenomena tidak digunakannya sekitar 200 surat suara di TPS 9 Kelurahan Nan Balimo pada Pilkada 2024 tidak bisa hanya dipahami sebagai persoalan administratif semata. Lebih dari itu, fenomena ini dapat mencerminkan adanya strategi politik praktis yang dijalankan oleh pasangan calon maupun tim suksesnya.

Misalnya, dalam praktik di lapangan sering dijumpai adanya serangan fajar, yaitu pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan agar mereka tidak datang ke TPS, atau agar mereka memilih dengan cara tertentu. Strategi semacam ini memungkinkan suara lawan menjadi lemah, karena meskipun pemilih tidak mendukung salah satu calon, mereka juga tidak memberikan suara kepada calon lainnya. Sehubungan dengan isu tersebut, penelitian yang saya lakukan ini, mencoba untuk menindaklanjuti hal yang menyebabkan adanya surat suara yang tidak terpakai tersebut melalui beberapa sumber yaitu anggota KPPS dan tim BAWASLU TPS 9 Kelurahan Nan Balimo, dimana politik uang mempengaruhi partisipasi politik karena sebagian orang tidak bersedia untuk memberikan hak suaranya jika tidak diberi uang. Untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, dapat dianalisis melalui pendekatan teori pertukaran dalam sosiologi yang menyoroti dinamika interaksi antara pemilih dan pelaku politik dalam konteks Pilkada.

Dalam teori pertukaran sosiologi menganalisis tentang interaksi antara pemilih dengan pengelola politik dalam konteks pemilihan umum. Fokus teori ini adalah bagaimana individu atau kelompok terlibat dalam pertukaran sosial yang melibatkan nilai-nilai dan sumber daya, serta bagaimana interaksi ini dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan mereka. Dalam konteks Pilkada, interaksi antara calon pemimpin, partai politik, dan pemilih sering kali melibatkan pertukaran yang tidak seimbang. Contohnya, calon pemimpin menawarkan adanya imbalan berupa uang atau barang kepada pemilih sebagai insentif untuk membeli hak suara mereka. Kemudian mereka lebih memilih menerima imbalan daripada

mempertimbangkan kualitas calon atau program yang ditawarkan. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya partisipasi politik. Teori ini menjelaskan bahwa adanya penyimpangan dalam pertukaran ini yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

Kelurahan Nan Balimo, yang terletak di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, merupakan unit analisis yang relevan dan strategis dalam mengkaji dinamika partisipasi politik masyarakat pada tingkat lokal. Dengan jumlah pemilih terdaftar yaitu 2.481 laki-laki dan 2.288 perempuan, komposisi gender di wilayah ini cukup seimbang, yang menunjukkan adanya potensi partisipasi politik yang tinggi. Kelurahan Nan Balimo dipilih sebagai lokasi penelitian karena menunjukkan variasi tingkat partisipasi pemilih yang cukup mencolok antar Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan data dari KPU Kota Solok, terdapat 15 TPS di kelurahan ini. Salah satu TPS dengan tingkat partisipasi tertinggi adalah TPS 15 dengan angka 70,84%. Namun, di sisi lain, TPS 9 mencatatkan partisipasi terendah, yaitu sebesar 59,76%. Mengacu pada Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) 2024, partisipasi pemilih dikategorikan rendah jika persentasenya di bawah 60%, dan tinggi jika melebihi 77,5%. Dengan demikian, tingkat partisipasi di TPS 9 termasuk kategori rendah karena tidak mencapai ambang batas minimal yang ditetapkan. Fakta ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Nan Balimo terdapat wilayah dengan tingkat partisipasi yang masih tergolong rendah, meskipun kelurahan ini memiliki potensi partisipasi yang cukup besar dilihat dari jumlah pemilih dan latar belakang sosial yang beragam. Kondisi ini menjadikan Kelurahan Nan Balimo sebagai tempat yang tepat untuk meneliti lebih dalam tentang faktor-faktor apa saja yang memengaruhi

rendahnya partisipasi pemilih, serta bagaimana kesadaran politik masyarakat terbentuk di tingkat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi tentang penurunan partisipasi pemilih di TPS 9 Kelurahan Nan Balimo yang dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan warga. Dengan memahami konteks lokal ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika interaksi antara politik uang dan partisipasi pemilih, serta mendorong partisipasi yang lebih adil dan transparan dalam proses pemilihan.

1.2 Rumusan Masalah

Partisipasi politik masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Namun pada Pilkada 2024 di Kota Solok, khususnya di TPS 9 Kelurahan Nan Balimo, ditemukan adanya penurunan partisipasi pemilih. Fenomena ini mencerminkan berbagai persoalan mendasar dalam dinamika politik lokal, salah satunya adalah praktik politik uang yang tidak lagi dilihat sebagai pelanggaran, melainkan telah menjadi norma sosial baru.

Penurunan partisipasi di TPS 9 yang mencapai 59,76% di bawah ambang batas partisipasi ideal menurut Indeks Partisipasi Pemilu menjadi gejala sosial yang patut dikaji secara sosiologis. Melalui pendekatan teori pertukaran perilaku George C. Homans, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana praktik politik uang dan ketimpangan dalam relasi timbal balik memengaruhi keputusan masyarakat untuk berpartisipasi atau tidak dalam Pilkada. Berdasarkan penjelasan tersebut,

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Mengapa partisipasi pemilih di TPS 9 Kelurahan Nan Balimo bisa menurun akibat adanya praktik politik uang?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya partisipasi pemilih di TPS 9 Kelurahan Nan Balimo.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui upaya yang dilakukan pihak tim sukses pasangan calon dalam menarik minat masyarakat di TPS 9 Kelurahan Nan Balimo untuk ikut memilih.
2. Mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku pemilih.
3. Mengetahui hubungan timbal balik dalam politik memengaruhi minat masyarakat untuk memilih di TPS 9 Kelurahan Nan Balimo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Manfaat penelitian ini secara akademik adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu sosiologi politik, khususnya yang berkaitan dengan perilaku pemilih dan dinamika partisipasi politik masyarakat dalam konteks lokal. Studi ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin

mengkaji hubungan antara praktik transaksional dalam politik dengan partisipasi pemilih.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan tim sukses pasangan calon dalam merumuskan strategi pendekatan yang lebih etis dan efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran politik dan membangun sikap kritis terhadap bentuk-bentuk relasi politik yang bersifat transaksional.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Partisipasi Politik

Keikutsertaan individu dalam proses politik merupakan definisi dari partisipasi politik. Dalam konteks sosiologis, ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, yaitu: pertama, identitas sosial seseorang, seperti kelas, etnis, gender, dan agama, dapat memengaruhi seberapa aktif mereka terlibat dalam politik. Misalnya, kelompok tertentu mungkin lebih aktif karena memiliki kepentingan atau pengalaman yang sama. Menurut Damsar (2015:179), partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai turut ambil bagian, ikut serta atau berperan serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), kehidupan publik (*public life*), pemerintahan (*government*), negara (*state*), konflik dan resolusi konflik (*conflict dan conflict resolution*), kebijakan (*policy*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*). Partisipasi politik mencakup berbagai bentuk

yaitu pemungutan suara, keanggotaan partai, dan aktivitas kampanye. Partisipasi politik dapat dipahami sebagai upaya terstruktur oleh warga negara untuk memilih pemimpin dan mempengaruhi kebijakan publik. Upaya ini dilakukan dengan kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam negara. Menurut Verba et al. (1995), partisipasi dipengaruhi oleh faktor demografis, sosial, dan psikologis, termasuk pendidikan, pendapatan, serta pengaruh lingkungan sosial (Verba et al, 1995). Bentuk partisipasi politik itu dapat dilihat melalui aktivitas politik yang dilakukan. Salah satu bentuk yang paling dikenal adalah voting (pemungutan suara) untuk memilih wakil rakyat, kepala daerah, atau presiden. Namun, memberikan suara dalam pemilu bukanlah satu-satunya bentuk dari partisipasi politik. Hasil pemilu hanya memberikan gambaran umum mengenai partisipasi tersebut. Masih ada banyak bentuk partisipasi lainnya yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak terbatas hanya pada waktu pemilu. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dalam pemilu sering kali berbeda dengan tingkat partisipasi dalam kegiatan politik lainnya. Oleh karena itu, untuk mengukur partisipasi, perlu dilakukan penelitian terhadap berbagai aktivitas politik lain.

Menurut Milbrath dan Goel, terdapat tiga kategori dalam partisipasi politik (Burdiadjo, 2000):

1. Pemain (Gladiators) 5-7% dari populasi yang sangat aktif dalam politik.
2. Penonton (Spectators) 60% dari populasi yang berpartisipasi secara minimal, termasuk menggunakan hak pilih mereka.

3. Apatitis (Apathetics) 33% dari populasi yang tidak aktif sama sekali, termasuk tidak menggunakan hak pilih.

Dengan demikian, masyarakat yang ikut berkontribusi dalam kegiatan politik, contohnya seperti pada pemilihan umum dengan memberikan hak pilih mereka untuk berkontribusi pada proses pemilihan umum. Dalam partisipasi politik, keaktifan bisa berpengaruh pada langkah kepala daerah yang terpilih untuk merumuskan keputusan dan kebijakan. Dimana Aktivitas yang mereka lakukan memiliki dampak politik.

1.5.2 Perilaku Pemilih dalam Pilkada

Menurut Adman Nursal (2004: 5) dalam jurnal Politika menyebutkan pendekatan untuk melihat perilaku pemilih ada 4, yaitu: pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan rasional, dan pendekatan domain kognitif. Secara sosiologis perilaku memilih seseorang ditentukan oleh karakteristik dan pengelompokan- pengelompokan sosial, baik secara formal (organisasi, kelompok, okupasi, lembaga) maupun secara informal (keluarga, pertemanan, kelompok kecil) (Fitriyah, 2013). Faktor sosiologis tidak dapat langsung mempengaruhi keputusan untuk memilih, tapi dihubungkan dengan persepsi dan sikap, baik terhadap faktor sosiologis maupun partai politik. Kekuatan uang juga dapat mempengaruhi perilaku pemilih dalam pemilu maupun Pilkada.

Pilihan politik dalam Pilkada sangat dipengaruhi oleh beragam faktor, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Ketiga aspek ini saling berinteraksi dan membentuk preferensi pemilih dalam konteks lokal. Dari segi sosial, aspek seperti tingkat pendidikan, posisi dalam masyarakat, pengaruh tokoh lokal, serta kondisi

lingkungan turut memengaruhi minat dan keterlibatan politik individu. Masyarakat yang tinggal di lingkungan dengan kesadaran politik tinggi cenderung lebih aktif berpartisipasi, sebaliknya, sikap apatis dalam lingkungan sosial dapat menurunkan partisipasi. Secara ekonomi, latar belakang pekerjaan dan tingkat pendapatan dapat memengaruhi cara pandang pemilih terhadap calon. Pemilih dari kalangan ekonomi menengah ke bawah mungkin lebih rentan terhadap iming-iming material, sementara mereka yang lebih sejahtera cenderung menilai berdasarkan program dan visi-misi calon. Dalam aspek budaya, nilai-nilai tradisional, adat istiadat, serta identitas etnis atau kedaerahan masih memiliki pengaruh kuat. Preferensi terhadap calon yang memiliki kesamaan latar belakang budaya sering kali menjadi penentu pilihan dalam Pilkada, terutama di daerah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai lokal.

Penelitian terhadap tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada di masa lalu penting untuk memberikan gambaran umum tentang tren partisipasi politik masyarakat. Tingkat partisipasi ini biasanya tidak konstan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi dalam Pilkada Serentak 2020 mencapai sekitar 76,09%, meskipun saat itu dilaksanakan dalam kondisi pandemi. Sedangkan, pada Pilkada 2024 hanya mencapai sekitar 66,81%. Pada tingkat lokal, partisipasi pemilih sangat dipengaruhi oleh konteks daerah masing-masing. Dalam kasus TPS 9, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, penurunan partisipasi pada Pilkada 2024 perlu dianalisis secara spesifik. Dengan membandingkan partisipasi pada pemilu

sebelumnya, peneliti dapat menelusuri faktor-faktor utama yang menyebabkan turunnya angka keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka.

1.5.3 Praktik Politik Uang dalam Pilkada

Politik uang (*money politic*) dimana uang digunakan untuk memengaruhi perilaku pemilih dalam pemilu merupakan pengertian politik uang dalam aspek sosiologis. Fenomena ini menggambarkan bahwa adanya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Ketidaksetaraan sosial dalam konteks ini mencerminkan di mana individu atau kelompok yang memiliki sumber daya lebih dapat memengaruhi hasil pemilu. Di Indonesia, politik uang merupakan praktik yang sering terjadi dalam pemilihan umum, di mana kandidat atau partai politik memberikan imbalan kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka (Aspinall, 2015). Salah satu bentuk paling umum dari politik transaksional adalah politik uang (*money politics*), yaitu pemberian materi atau uang kepada pemilih dengan tujuan untuk memperoleh dukungan suara (Solihah, 2016). Selain bentuk uang tunai, politik transaksional juga bisa berbentuk pemberian barang, janji pekerjaan, bantuan sosial, atau fasilitas tertentu yang dijanjikan atau diberikan menjelang pemilihan. Fenomena ini merusak esensi demokrasi karena mengalihkan fokus pemilih dari program dan kualitas calon menjadi semata-mata transaksi material jangka pendek.

Dalam konteks Pilkada, politik transaksional kerap dilakukan secara tersembunyi dan sistematis, memanfaatkan jaringan relawan, tokoh lokal, atau bahkan oknum penyelenggara untuk mendistribusikan insentif kepada pemilih secara langsung.

Politik uang biasanya dilakukan dengan cara yang terstruktur, mulai dari identifikasi pemilih potensial, pembagian insentif menjelang hari pemilihan, hingga kontrol melalui jaringan tim sukses atau relawan di tingkat TPS. Mekanisme ini menasar pemilih yang dianggap “mengambang” atau kurang memiliki loyalitas politik. Maraknya praktik politik uang merupakan salah satu bentuk bahwa belum tuntasnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rusaknya integrasi dalam pemilu dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi disebabkan oleh adanya politik uang. Politik uang didefinisikan juga sebagai praktik pembelian suara dalam proses pemilihan umum. Di Indonesia praktik politik uang sudah terjadi cukup lama karena praktik politik uang sudah dinormalisasikan dan sudah menjadi rahasia umum. Politik uang bukan hanya dianggap sebagai sekedar masalah atau penyimpangan tetapi kebangkitan peradaban kotor budaya politik Indonesia. Alasannya, masyarakat beranggapan bahwa politik transaksional dalam Pilkada merupakan suatu hal yang biasa. Sementara itu, jika masyarakat disodori dengan uang atau barang maka semakin permisif masyarakat tersebut dengan politik uang.

Dalam studi kasus Pilkada di beberapa daerah, praktik politik transaksional terbukti menyebabkan ketidakpercayaan terhadap proses pemilu, bahkan berdampak pada penurunan partisipasi pemilih di masa depan, terutama jika masyarakat merasa suara mereka telah “dibeli” dan tidak berdampak pada perubahan kebijakan. Di TPS 9 Kelurahan Nan Balimo, misalnya laporan dari masyarakat ke pihak Bawaslu yaitu dugaan adanya praktik politik uang dapat menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya partisipasi pemilih dalam Pilkada

2024. Ketidakpuasan terhadap proses yang tidak bersih dapat membuat pemilih apatis atau enggan berpartisipasi kembali.

1.5.4 Hubungan Timbal Balik dalam Politik Lokal

Dalam perspektif sosiologi politik, hubungan sosial tidak hanya dipahami sebagai interaksi antarindividu, tetapi juga sebagai struktur kekuasaan dan kepentingan yang membentuk dinamika dalam masyarakat. Hubungan timbal balik (*reciprocity*) merujuk pada pola saling memberi dan menerima antara dua pihak yang berlangsung secara berkelanjutan dan berlandaskan pada kepercayaan serta kepentingan bersama. Dalam konteks politik lokal, hubungan timbal balik antara pemilih dan aktor politik seringkali tidak netral. Ia dapat berbentuk pertukaran simbolik seperti penghargaan dan dukungan moral, namun juga bisa berbentuk pertukaran material, seperti bantuan ekonomi dan janji jabatan (Sobari, 2020). Hubungan ini dapat memperkuat solidaritas komunitas, tetapi juga berpotensi menciptakan ketergantungan.

Hubungan antara pemilih dan politisi didominasi oleh motif transaksional, pola partisipasi masyarakat cenderung bersifat praktis dan jangka pendek. Pemilih lebih mementingkan keuntungan langsung daripada menilai kemampuan pemimpin atau rencana pembangunan daerah. Dampaknya, terjadi penurunan kesadaran politik dan melemahnya partisipasi politik. Masyarakat yang merasa hanya dibutuhkan saat pemilu berlangsung akan cenderung apatis di luar musim pemilu. Hal ini berpotensi menciptakan siklus ketidakpercayaan terhadap proses politik dan mendorong rendahnya partisipasi di masa depan.

Dengan kata lain, praktik politik yang transaksional dan hubungan yang bersifat satu arah dapat melemahkan substansi demokrasi lokal. Partisipasi yang seharusnya didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara berubah menjadi sekadar “tukar suara dengan imbalan”, sehingga fungsi pendidikan politik dalam pemilu menjadi terabaikan.

1.5.5 Tinjauan Sosiologis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertukaran perilaku (*exchange theory*) yang dikemukakan oleh George Casper Homans. Teori ini menganalisis fenomena politik uang dan penurunan partisipasi masyarakat di Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok. Teori ini termasuk dalam paradigma perilaku sosial yang dapat diamati dan diukur (Ritzer, 2009).

Menurut Homans, untuk memahami perilaku sosial, penting untuk menjelaskan adanya interaksi yang terjadi, bukan hanya sebatas menggambarannya saja. Dalam penelitian ilmiah, fokus utama harus diarahkan pada perilaku yang benar-benar dapat diamati dan diuji secara empiris (Mighfar, 2015: 265). Konsep pertukaran sosial sendiri tidak selalu diukur melalui nilai material seperti uang, karena dalam praktiknya, interaksi sosial melibatkan pertukaran hal-hal yang bersifat nyata maupun simbolik (Poloma, 2010: 52).

Teori pertukaran yang dikemukakan oleh George C. Homans berkaitan erat dengan aspek psikologis manusia, di mana hubungan antara sebab dan akibat dari suatu tindakan dijelaskan melalui pendekatan psikologi perilaku.

Asumsi dari teori pertukaran menurut Homans yaitu individu akan melakukan tindakan tertentu untuk memperoleh ganjaran (*reward*) dan menghindari hukuman (*punishment*). Ketika seseorang menerima ganjaran dari tindakannya dan berhasil menghindari hukuman, maka kemungkinan besar ia akan mengulangi perilaku tersebut di masa depan (Poloma, 2010: 61). Dalam kerangka ini, semakin besar ganjaran (*reward*) yang diterima atau dijanjikan, semakin besar pula kemungkinan individu mengulangi perilakunya. Sebaliknya, jika ancaman (*punishment*) hukuman dirasa tinggi, kecenderungan untuk mengulangi perilaku tersebut menjadi semakin kecil.

Homans menjelaskan teori pertukaran ini dalam lima proposisi yang dapat diterapkan dalam konteks penelitian ini, yaitu:

1. **Proposisi Sukses:** menjelaskan bahwa apabila seseorang sukses atau berhasil untuk memperoleh ganjaran (*reward*) dari tindakannya, maka ia akan cenderung atau semakin sering untuk mengulangi tindakannya tersebut.
2. **Proposisi Stimulus:** Apabila dalam situasi yang sudah lewat memilih menerima imbalan dari tindakan memilih, maka mereka akan lebih cenderung untuk mengulangi tindakan tersebut di situasi yang serupa di masa depan.
3. **Proposisi Nilai:** Semakin tinggi nilai suatu tindakan, semakin besar kemungkinan individu untuk melakukannya. Maksudnya adalah semakin berharga atau bernilai bagi seseorang tingkah laku orang lain yang ditujukan atau diarahkan padanya maka makin besar pula kemungkinan seseorang itu untuk mengulangi tingkah lakunya. Pada proposisi ini Homans dikenal dengan konsep ganjaran dan hukuman (*reward* dan *punishment*).

4. Proposisi Kejenuhan: Semakin sering pemilih menerima imbalan, semakin berkurang nilai dari setiap imbalan yang diterima.
5. Proposisi Persetujuan dan Agresi: Jika pemilih tidak mendapatkan imbalan yang diharapkan atau merasa dirugikan, mereka mungkin akan mengalami emosi negatif, seperti kemarahan atau kekecewaan.

Dengan menerapkan teori pertukaran perilaku Homans, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana politik uang memengaruhi partisipasi masyarakat di Kelurahan Nan Balimo serta bagaimana dinamika imbalan dan hukuman berperan dalam perilaku pemilih.

1.5.6 Penelitian Relevan

Penelitian sebelumnya sangat diperlukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan penelitian yang mempengaruhi dan mendukung sebuah penelitian. Peneliti mencoba untuk menghubungkan beberapa hal yang berkaitan dengan topik penelitian tentang menganalisis fenomena politik uang dan penurunan partisipasi masyarakat di Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok karena adanya praktik politik uang dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

UNIVERSITAS ANDALAS

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan

No.	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Afdhalur Rahmat, Suryanef, Al Rafni, Susi Fitria Dewi (2024).	Upaya KPU Kabupaten Solok dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda pada Pemilu 2024.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan KPU Kabupaten Solok dalam meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya dari kalangan generasi muda yaitu dengan melakukan sosialisasi langsung maupun tidak langsung, membentuk badan Ad Hoc, mendirikan Rumah Pintar Pemilu, dan melibatkan relawan demokrasi. Meskipun strategi ini cukup efektif, pelaksanaannya masih menemui kendala dalam hal keterbatasan anggaran. Penelitian ini menekankan peran KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam mendorong partisipasi, sedangkan penelitian ini justru melihat dari sisi penerima pesan, yakni masyarakat pemilih, serta bagaimana strategi tim sukses melalui praktik politik uang turut memengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat.
2.	Zona Rida Rahayu (2024).	Persepsi Masyarakat Kota Solok Melalui Komunikasi Publik: Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Tahun 2024.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana panitia Ad Hoc (PPK dan PPS) dapat memahami persepsi masyarakat dalam konteks pemilu, serta strategi komunikasi yang perlu dilakukan agar masyarakat terdorong secara sadar untuk menggunakan hak pilihnya. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk pengabdian masyarakat yang melibatkan 49 anggota panitia pemilu, dan menyarankan pendekatan komunikasi seperti metode 5S (senyum, sapa, sabar, santun, sederhana), bahasa cinta, dan komunikasi empatik. Dengan strategi komunikasi yang sesuai, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar pentingnya berpartisipasi dalam pemilu dan menyalurkan hak pilihnya dengan kesadaran, bukan paksaan atau manipulasi.
3.	Hikmat (2022).	Pertukaran Sosial: Partisipasi Masyarakat dan Masa Depan Pemilu Umum di Indonesia.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik warga sangat ditentukan oleh persepsi terhadap keadilan dan keuntungan dalam hubungan timbal balik antara pemilih dan aktor politik. Ketika masyarakat merasa bahwa janji politik atau insentif yang ditawarkan tidak ditepati, kepercayaan terhadap proses pemilu menurun, dan hal ini berdampak pada meningkatnya angka golput. Studi ini menyimpulkan bahwa perilaku golput bukan semata-mata disebabkan oleh apatisme, melainkan sebagai

			respons terhadap ketidakseimbangan hubungan pertukaran. Penelitian ini relevan dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan teori pertukaran sosial untuk menjelaskan penurunan partisipasi pemilih sebagai akibat dari gagalnya realisasi janji politik yang diberikan oleh tim sukses atau calon kepala daerah.
--	--	--	---



1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan strategi atau upaya yang dipilih oleh peneliti dalam mengamati, mengumpulkan informasi dan menyajikan analisis hasil. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Afrizal (2014: 12), pendekatan kualitatif merupakan pendekatan dalam ilmu-ilmu sosial yang bertujuan untuk memahami realitas sosial dari perspektif partisipan. Dimana pendekatan ini sering digunakan sebagai metode ilmiah oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui secara mendalam berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih, serta untuk menggali perspektif dan pengalaman masyarakat di TPS 9 Kelurahan Nan Balimo yang menjadi subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Jenis penelitian tipe deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang akurat dan sistematis mengenai berbagai faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menyajikan data secara apa adanya, sebagaimana ditemukan di lapangan, tanpa manipulasi atau perlakuan tertentu (Moleong, 2017).

Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dan dianalisis dalam bentuk naratif, bukan angka, sehingga pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, nilai, dan alasan di balik perilaku masyarakat. Peneliti tidak melakukan kuantifikasi terhadap data, tetapi justru berusaha menggali secara mendalam pengalaman subjektif dan konteks sosial dari para informan.

Dalam konteks ini, penelitian menitikberatkan pada bagaimana praktik politik yang berlangsung, bagaimana persepsi masyarakat terhadap proses pilkada, serta apa saja penyebab masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan, peneliti melakukan pengumpulan data melalui teknik observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan warga, tokoh masyarakat, petugas KPPS, dan tim BAWASLU. Hasil dari pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai fenomena yang terjadi dan menjadi dasar bagi upaya perbaikan proses demokrasi lokal ke depan.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi kepada peneliti, baik informasi tentang dirinya maupun orang lain. Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua orang di lokasi penelitian memiliki informasi yang relevan dengan fokus studi, yakni fenomena Penurunan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2024 di TPS 9 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok. Dalam sebuah penelitian ada dua kategori informan yaitu informan pengamat dan informan pelaku (Afrizal, 2014, p. 139).

1. Informan Pelaku, adalah masyarakat yang menjadi bagian langsung dari fenomena yang diteliti, yaitu individu yang terdaftar sebagai pemilih namun tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024. Mereka merupakan

subjek utama dalam penelitian ini karena pengalaman dan pandangannya berkaitan langsung dengan rendahnya partisipasi pemilih.

Berikut kriteria untuk informan pelaku dalam penelitian, yaitu:

- 1) Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 9 Kelurahan Nan Balimo.
 - 2) Tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pilkada 2024.
 - 3) Berdomisili di wilayah tersebut.
 - 4) Tim sukses masing-masing calon yang terlibat langsung dalam kampanye, dan strategi pemenangan di TPS 9.
2. Informan Pengamat, adalah pihak-pihak yang tidak secara langsung menjadi subjek utama dari penurunan partisipasi, namun memiliki posisi atau kapasitas dalam mengamati dan menjelaskan dinamika sosial-politik yang terjadi di TPS 9. Informan ini dipilih karena dianggap memiliki wawasan, pengalaman, atau pengetahuan tentang pelaksanaan Pilkada dan karakteristik pemilih di wilayah tersebut.

Berikut kriteria untuk informan pengamat dalam penelitian, yaitu:

- 1) Memiliki peran dalam penyelenggaraan pemilu, pengawasan, atau kepemimpinan sosial di lingkungan setempat.
- 2) Mengetahui kondisi sosial-politik dan perilaku pemilih di wilayah penelitian.
- 3) Mampu memberikan informasi objektif dan mendalam.

Pemilihan informan dilakukan hingga mencapai saturasi data, yaitu ketika informasi yang diperoleh dari informan sudah tidak lagi memberikan data baru yang

signifikan. Dengan teknik *purposive sampling*, diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang mendalam, relevan, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Tabel 1. 2
Informan Penelitian

No	Nama	Usia (Tahun)	Status
1.	RM (Inisial)	45	Informan Pelaku
2.	W (Inisial)	33	Informan Pelaku
3.	KP (Inisial)	50	Informan Pelaku
4.	RB (Inisial)	48	Informan Pelaku
5.	YA (Inisial)	50	Informan Pelaku
6.	N (Inisial)	38	Informan Pelaku
7.	IM (Inisial)	50	Informan Pelaku
8.	YN (Inisial)	42	Informan Pelaku
9.	GD (Inisial)	23	Informan Pelaku
10.	N (Inisial)	53	Informan Pengamat
11.	Rafiqul Amin, S.Pd. I, M.Pd	40	Informan Pengamat

Sumber: Data Primer, 2025

1.6.3 Data yang diambil

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada 3 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data kualitatif adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata (tertulis ataupun lisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, tanpa ada upaya mengangkakan data yang didapatkan (Afrizal, 2014, p. 17). Berikut penjelasannya:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian yang dalam hal ini data berupa teks hasil wawancara sebagai sumber pertama (Siyoto et al., 2015). Data dapat direkam dan dicatat oleh peneliti. Data primer pada penelitian ini adalah data yang didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan informan yakni

masyarakat yang berpartisipasi dalam Pilkada 2024 di TPS 9 Kelurahan Nan Balimo.

2. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang yang ada diluar peneliti sendiri atau dari sumber yang telah ada (Siyoto et al., 2015). Data dapat diperoleh oleh peneliti melalui membaca, mendengar, melihat sesuatu yang sudah ada berupa data-data. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui data dalam bentuk teks seperti data laporan masyarakat terkait pilkada 2024 dari Bawaslu Kota Solok, analisis media sosial, serta jurnal, artikel, buku dan website terkait dengan menurunnya partisipasi politik masyarakat dalam pilkada 2024 di Kota Solok dengan tujuan menambah referensi.

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam upaya memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian dan mampu mencapai tujuan dari penelitian. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang valid teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan Teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dalam hal ini didukung dengan dokumentasi yang dijadikan sebagai data pendukung.

Wawancara Mendalam / *Indepth Interview*

Menurut (Afrizal, 2014) wawancara mendalam adalah interaksi sosial informan antara peneliti dan informan tentang suatu hal atau berbagai hal dengan cara yang terkontrol, terarah dan sistematis sehingga kualitas hasil wawancara menjadi baik. Dalam hal ini, pertanyaan yang diajukan kepada informan tidak

direncanakan sebelumnya secara mendetail, namun pertanyaan-pertanyaan umum yang pada akhirnya dikembangkan sehingga menjadi detail dalam wawancara.

Pada tanggal 28 April 2025 dilakukan wawancara mendalam dengan RM (45) selaku warga disekitar TPS 9 Kelurahan Nan Balimo, Kota Solok. Beliau pada saat itu berada di warung satenya sedang berjualan didepan rumahnya, sebelumnya peneliti sudah membuat janji untuk bertemu melalui media *WhatsApp*. Pada tanggal 28 April ini, peneliti membuat janji wawancara tidak hanya dengan informan RM (45) saja tetapi juga dengan informan S (23), sebelumnya peneliti juga sudah melakukan konfirmasi untuk wawancara dengan informan S (23). Wawancara dilakukan dirumah informan S (23) pada sore hari. Selanjutnya, pada tanggal 29 April 2025. Peneliti mengunjungi kantor Bawaslu Kota Solok untuk mewawancarai Bapak Rafiqul Amin, S.Pd. I, M. Pd. (40) selaku Ketua Bawaslu Kota Solok. Beliau merupakan informan pengamat dalam penelitian ini. Sebelumnya peneliti juga sudah membuat janji melalui media *WhatsApp*. Wawancara dilakukan pada siang hari setelah jam istirahat.

Pada tanggal 30 April 2025 peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan W (33) dirumah informan pada malam hari, setelah beliau selesai bekerja. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan wawancara pada tanggal 31 April 2025 dengan N (53) selaku informan pengamat dalam penelitian ini yang merupakan anggota KPPS pada Pilkada 2024 di Kota Solok. Wawancara dilakukan di kedai rumah beliau pada malam hari. Selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2025 peneliti melakukan wawancara dengan informan KP (50) dari tim sukses pasangan calon. Wawancara dilakukan pada sore hari dirumah beliau. Namun, wawancara

dengan informan KP tidak dilakukan hanya 1 kali wawancara saja. Tetapi 2 kali wawancara. Awalnya peneliti melakukan pendekatan dulu dengan informan dengan menanyakan pertanyaan- pertanyaan umum tentang Pilkada 2024. Lalu besoknya, peneliti mulai mewawancarai sesuai dengan pedoman wawancara peneliti. Setelah itu pada tanggal 05 Mei 2025 peneliti melakukan wawancara dengan informan RB (48) selaku tim sukses pasangan calon. Wawancara dilakukan di rumah beliau, pada malam hari selesai beliau bekerja.

Pada tanggal 26 Agustus 2025, peneliti melakukan wawancara bersama informan YA (50) tahun di rumah beliau dan kebetulan pada hari itu beliau tidak ada kegiatan sehingga wawancara bisa dilakukan siang hari. Pada hari itu wawancara tidak dilakukan dengan satu informan saja tapi juga ada informan lain yaitu F (38) tahun, wawancara juga dilakukan di rumah beliau. Pada tanggal 27 Agustus 2025, peneliti melakukan wawancara sebanyak tiga kali dengan informan yang berbeda, Wawancara pertama dengan informan IM (50) tahun, YN (42) tahun dan GD (23) tahun. Wawancara dilakukan di masing- masing rumah informan.

Setelah mengumpulkan informan yang memadai, peneliti menyusun data temuan dari lapangan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan menemui informan penelitian satu persatu dengan tujuan menggali informasi dari informan yang termasuk pada kriteria informan penelitian. Wawancara mendalam ini juga dilakukan secara berulang kali, karena tidak memiliki alternatif jawaban sehingga dapat mengklarifikasi informasi yang sudah diperoleh. Teknik wawancara mendalam ini dilakukan agar peneliti mendapatkan

informasi mengenai penurunan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada 2024 di TPS 9 Kelurahan Nan Balimo.

Salah satu metode yang digunakan peneliti untuk menguji validasi data yaitu Teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek data yang diperoleh berdasarkan berbagai sumber. Nantinya peneliti akan mewawancarai narasumber yang berbeda tetapi membahas mengenai topik yang sama. Tujuannya adalah untuk melihat konsistensi informasi dari berbagai pihak.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis data merupakan salah satu komponen paling penting dalam sebuah penelitian, karena unit ini berfungsi sebagai satuan yang digunakan untuk menganalisis data yang relevan dengan fokus penelitian. Unit analisis dalam sebuah penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus topik permasalahan yang akan diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah pertama unit individu, yaitu masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 9, baik yang menggunakan maupun tidak menggunakan hak pilihnya.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif merupakan suatu proses yang sudah diatur untuk menetapkan bagian-bagian yang saling berkaitan antara bagian -bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan kesimpulan (Afrizal, 2014: 175). Data yang telah dikumpulkan didapatkan melalui wawancara dengan informan penelitian yang dilakukan di lapangan, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan. Analisis data terus menerus dilakukan selama penelitian dilaksanakan terhitung sejak awal mula terjun

ke lapangan sampai membuat hasil penelitian menjadi sebuah laporan. Dalam hal ini yang dianalisis adalah data mentah yang diperoleh di lapangan berupa catatan, penuturan, perbuatan, dan lain sebagainya yang sekiranya sesuai dengan pokok permasalahan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mengacu pada konsep Miles dan Huberman dalam (Saleh, 2017: 80), meliputi 3 rangkaian kegiatan yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya karena data yang didapatkan di lapangan jumlahnya cukup banyak sehingga perlu untuk dicatat secara rinci. Hal ini tentu saja membutuhkan reduksi data untuk menganalisis data yang diperoleh, dengan demikian data yang telah direduksi akan lebih jelas memberikan gambaran serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan sebelumnya. Proses berpikir dalam reduksi data membutuhkan kecerdasan, keleluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi

b. Penyajian Data/ *Display Data*

Tahapan lanjutan dalam analisis data yaitu penyajian data, dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan table. Tujuannya adalah untuk menyatukan informasi yang diperoleh agar memberikan gambaran mengenai keadaan yang sedang diteliti dan untuk memudahkan peneliti mengambil kesimpulan yang tepat.

c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Sejak awal penelitian tujuan dari peneliti melakukan analisis data adalah untuk mendapatkan kesimpulan agar mengetahui makna dari informasi yang di dapatkan. Selama proses penelitian sedang berlangsung, peneliti sudah bisa melakukan penarikan kesimpulan sementara dan setelah data yang terkumpul sudah benar-benar lengkap maka dapat ditarik kesimpulan akhir. Setelah ditarik kesimpulan, maka peneliti memastikan keabsahannya dengan cara melihat ulang kodifikasi dan penyajian data yang dilakukan pada tahap sebelumnya sehingga kekeliruan dalam analisis data tidak terjadi.

1.6.7 Defenisi Operasional Konsep

Definisi operasional merupakan kerangka konsep yang dijelaskan dan memiliki makna agar terjawabnya tujuan penelitian sehingga memunculkan instrumen penelitian. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah:

1. Partisipasi Pemilih, yaitu eterlibatan warga dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024. Dalam penelitian ini, partisipasi diukur dari hadir atau tidaknya pemilih di TPS 9 pada hari pemungutan suara.
2. Penurunan Partisipasi, yaitu kondisi menurunnya jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan jumlah pemilih terdaftar. Penurunan ini menjadi gejala utama yang dikaji dalam penelitian.
3. Faktor Penyebab Penurunan Partisipasi, yaitu segala hal yang memengaruhi keputusan pemilih untuk tidak datang ke TPS, seperti kurangnya sosialisasi, rasa tidak percaya pada calon atau proses pemilu, pengaruh politik uang, tekanan ekonomi, serta lingkungan sosial yang pasif terhadap politik.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang, permasalahan daerah yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah TPS 9, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok. Secara lebih spesifik, lokasi penelitian ini berfokus pada TPS 9 Kelurahan Nan Balimo, yang secara geografis terletak di kawasan Gurun Bagan.

Gurun Bagan merupakan lingkungan pemukiman yang dikenal secara sosial oleh masyarakat dan berada dalam wilayah administratif Kelurahan Nan Balimo. Meskipun tidak memiliki status administratif tersendiri seperti nagari atau desa, Gurun Bagan telah menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat setempat dan memiliki karakteristik tersendiri dalam praktik politik lokal.

Alasan memilih lokasi ini karena setelah membandingkan 15 TPS yang ada di Kelurahan Nan Balimo, TPS 9 memperoleh persentase partisipasi yaitu sebesar 59,76% persentase tersebut termasuk kategori rendah berdasarkan Indeks Partisipasi Pemilu, dimana persentase partisipasi dikategorikan tinggi jika $>77,5\%$. (KPU Kota Solok, 2024; Data Primer, 2025)

1.6.9 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dilakukan selama 7 bulan dari bulan Februari hingga Agustus 2025. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2025						
		Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Seminar Proposal							
2	Menyusun Instrumen Penelitian							
3	Pengumpulan Data							
4	Analisis Data							
5	Penulisan dan Bimbingan Skripsi							
6	Sidang Skripsi							

